

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan dilindungi, tercantum dalam undang-undang 1945 pasal 31 ayat 1 adalah pendidikan yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada setiap warganya tanpa terkecuali. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengamanatkan hak atas pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara. Mendapatkan pendidikan memang menjadi hak bagi setiap warga negara di Indonesia, termasuk pula pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang mengamanatkan tentang pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus.

Pendidikan merupakan hak semua manusia, UNESCO telah membuat gagasan “pendidikan untuk semua” atau “*Educational for All*” (Anik, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan ditujukan bagi semua lapisan masyarakat agar memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memandang perbedaan yang dimiliki antara anak reguler maupun anak berkebutuhan. Semua anak berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dalam proses pelaksanaan pendidikan dari tingkatan PAUD sampai pendidikan tinggi tentu saja memiliki berbagai tantangan. Sebagai contoh seperti anak-anak yang memiliki kebutuhan

khusus sehingga pihak pelaksana pendidikan harus memberikan perhatian khusus dalam proses pembelajarannya. Penting untuk menyediakan suatu program pendidikan yang bisa mengakomodasi setiap kebutuhan anak baik untuk anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada awalnya lebih dikenal dengan istilah anak cacat, anak berkelainan maupun anak luar biasa. Anak kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial, emosional, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain (Setianingsih, 2017). Anak berkebutuhan khusus dipandang sebagai penghambat dalam perjalanan kehidupan sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda terhadap pemberian layanan pendidikan. Pada layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus terpisah dengan anak yang reguler, agar proses pembelajaran tidak terganggu.

Penjelasan ini didukung oleh data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus di Indonesia berjumlah 1,6 juta orang. Hal ini menandakan bahwa satu juta lebih anak berkebutuhan khusus masih belum memperoleh pendidikan yang penting bagi kehidupannya (Purba, 2017). Purba menambahkan bahwa 30% anak berkebutuhan yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% diantaranya yang bisa mengikuti pendidikan inklusi, baik dari sekolah luar biasa (SLB), atau sekolah biasa yang melaksanakan sistem pembelajaran inklusi. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan. Dimulai dari infrastruktur yang dimiliki sekolah belum memadai, kurangnya tenaga pengajar

khusus pada sekolah inklusi dalam menangani anak berkebutuhan khusus, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan permasalahan yang masih ditemui di lapangan, pemerintah semakin gencar menggalangkan kebijakan-kebijakan terhadap sekolah yang melaksanakan program dengan sistem inklusi.

Inklusi merupakan pendekatan yang dapat membentuk suatu lingkungan yang semakin terbuka dengan mengikut sertakan berbagai kalangan yang memiliki perbedaan kondisi, kemampuan, status, latar belakang, karakteristik, etnik, budaya dan lainnya. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai dalam bentuk gagasan baru pada pendidikan yang menanamkan prinsip ataupun sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Hendrowati, 2017).

Pembelajaran yang ramah merupakan konsep dari pendidikan inklusif. Pada proses pembelajaran, terlihat peserta didik dan pendidik belajar bersama dalam suatu komunitas belajar. Guru menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, memberikan dukungan agar semua anak dapat berpartisipasi dengan aktif, serta memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Pendidikan inklusi akan memberi ruang kepada semua anak untuk belajar sehingga kecakapan dan karakter pada peserta didik dapat dibentuk dengan cara yang bijak. Pada

lingkup pelaksanaan pendidikan Ita (2019) menyatakan bahwa istilah inklusi dapat diartikan sebagai model pendidikan yang menanamkan sikap anti diskriminasi terhadap individu yang memiliki kemampuan atau pun kelainan. Pelaksanaan pendidikan inklusi memberi kesempatan bagi orang tua untuk memasukan anak di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut semua pihak sekolah menyesuaikan sistem program yang mencakup kurikulum sistem pembelajaran dan evaluasi, tenaga pendidik, sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik. (Direktorat PSLB, 2007) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusif yang peserta didiknya terdiri atas anak-anak reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus, maka diperlukan guru pendidikan khusus (GPK) yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus (*special education*). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan. Pendidikan inklusif bagian program pendidikan untuk semua, Hal ini melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dengan keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab semua untuk mendidik anak. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum,

sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Penerapan pendidikan inklusi memiliki berbagai kendala dan tantangan yang perlu dicermati oleh penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, *support system*, serta pemahaman dan implementasi pendidikan inklusi di lapangan (Retnaningtya, 2015).

Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anaknya, dimanapun anak tersebut menerima dan menjalani pendidikan, orang tua tetap berperan dalam menentukan masa depan pendidikan bagi anaknya. Peran orang tua dan masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan dan melaksanakan program pendidikan di sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan apresiasi terhadap keberadaan pendidikan inklusif, dan turut serta dalam sosialisasi mengenai pendidikan inklusi (Tejaningrum, 2017).

Persepsi orang tua siswa terhadap pendidikan inklusif akan menjadikan pelaksanaan pendidikan berjalan baik atau tidak baik, mengingat orang tua merupakan *stakeholder* yang sangat penting dalam pengembangan sekolah. Bagi orang tua anak reguler keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah juga sering menjadi pertanyaan, seperti apakah anak tersebut tidak akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, apakah dengan keberadaan anak tersebut perhatian guru akan lebih terfokus pada anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan teman-temannya yang lain (Kusumawardani, 2011). Pemahaman yang kurang tentang pendidikan inklusi akan melahirkan sikap orang tua tidak mendukung dalam pelaksanaan program PAUD inklusi dengan menyatakan alasan bahwa kehadiran anak berkebutuhan khusus dapat mengganggu proses pembelajaran.

Selain karena pemahaman orang tua yang kurang, tidak adanya pengalaman dengan anak berkebutuhan khusus pada seluruh orang tua, khususnya orang tua siswa reguler dapat membentuk persepsi negatif dan sikap menolak terhadap penerapan pendidikan inklusi.

Karakteristik tiap orang tua berbeda-beda, yang mengakibatkan berbeda pula persepsinya terhadap sekolah inklusi. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua siswa. Sesuai kenyataan di lapangan melalui tahapan observasi, memperlihatkan bahwa masih terdapat beberapa orang tua siswa reguler dengan latar belakang pendidikan tinggi (sarjana dan diploma) memindahkan anak mereka ke PAUD lain ketika mengetahui PAUD tersebut melaksanakan program inklusi dan lebih memilih anaknya sekolah di PAUD yang tidak ada anak berkebutuhan khusus di dalamnya. Alasan orang tua siswa reguler yang tidak mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah inklusi karena orang tua tidak mau kalau anak-anaknya bergabung dengan anak berkebutuhan khusus.

Orang tua menyatakan kekhawatirannya jika anak berkebutuhan khusus dan siswa lain belajar bersama di kelas reguler perilaku anak berkebutuhan khusus dapat mempengaruhi atau ditiru oleh siswa reguler, serta anggapan bahwa gangguan yang dialami anak berkebutuhan khusus dapat menular pada anak reguler (Kristiana, 2017). Respon orang tua dan guru terhadap pendidikan inklusi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Pendidikan inklusif tidak akan berjalan optimal apabila tidak ada dukungan dari orang tua siswa itu sendiri mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif. Program inklusif ini, sangat diharapkan dapat disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat maupun orang tua baik orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau orang tua anak reguler.

Permasalahan ini diperkuat dengan salah satu temuan kasus yang dikeluhkan oleh orang tua siswa reguler disalah satu sekolah PAUD yang terletak di daerah Denpasar yaitu TK Negeri Pembina Denpasar. Pada TK ini anak yang memiliki kebutuhan khusus berada pada kelompok B. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, anak tersebut terkadang tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal tersebut terlihat ketika anak lain sedang melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, anak yang memiliki kebutuhan khusus tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran bersama anak lainnya, anak tersebut lebih memilih melakukan kegiatan lain seperti, bermain permainan yang terdapat di kelas pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, keluar saat jam pelajaran, mengganggu teman, bahkan anak tersebut dapat berteriak hingga menangis histeris ketika keinginannya tidak dapat terpenuhi, sehingga membuat konsentrasi anak lainnya terganggu. Konsentrasi anak reguler selalu terpecah ketika anak yang memiliki kebutuhan khusus tidak mau mengikuti pelajaran di kelas. Melihat kejadian yang terdapat pada saat peneliti melakukan praktek pengalaman lapangan, terdapat berbagai persepsi orang tua sikap ataupun pendapat baik itu positif maupun negatif tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi tampaknya belum bisa dijadikan patokan, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan tentang konsep pendidikan inklusi.

Penelitian yang selama ini ada dalam konteks inklusif masih lebih pada manajemen pelaksanaannya, misalnya sikap guru terhadap pendidikan inklusif. Dalam penelitian ini akan menjelaskan sikap orang tua siswa reguler dalam pendidikan inklusif baik sikap positif maupun sikap negatif dari orang tua. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul Survei Persepsi Orang tua Mengenai Program PAUD Inklusi di Kota Denpasar Tahun 2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Orang tua tidak mau adanya pendidikan inklusi karena kurang memahami tentang pendidikan inklusi
- 1.2.2 Orang tua siswa kurang memahami kebijakan pemerintah mengenai program yang ada pada pendidikan inklusi
- 1.2.3 Orang tua kurang memahami penerapan pendidikan inklusi.
- 1.2.4 Orang tua siswa reguler memiliki kecemasan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang tercakup dalam penelitian ini sangat luas sehingga tidak memungkinkan semua masalah untuk diteliti, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan. Dalam penelitian ini, masalah yang dibatasi yaitu pada Survei Persepsi Orang Tua Mengenai Program PAUD Inklusi di Kota Denpasar Tahun 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- 1.4.1 Bagaimanakah *persepsi* orang tua mengenai program PAUD inklusi di Kota Denpasar Tahun 2020 dilihat dari aspek kebijakan pemerintah?

1.4.2 Bagaimanakah *persepsi* orang tua mengenai program PAUD inklusi di Kota Denpasar Tahun 2020 dilihat dari aspek penerapan pendidikan inklusi?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari survei persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar tahun 2020 sebagai berikut.

1.5.1 Untuk mengetahui persepsi orang tua mengenai program PAUD inklusi di Kota Denpasar dilihat dari aspek kebijakan pemerintah.

1.5.2 Untuk mengetahui persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar dilihat dari aspek penerapan pendidikan inklusi.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil pada penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori pembelajaran, khususnya teori untuk anak usia dini.

1.6.1 Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pendidikan, yang lebih mengenai survei persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar Tahun 2020.

1.6.2 Manfaat Praktis

(a) Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman pribadi dalam melakukan penelitian pendidikan khususnya tentang

persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar Tahun 2020.

(b) Bagi Lembaga Pendidikan Usia Dini

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan pemahaman orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar.

(c) Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua dalam pemilihan sekolah bagi anak.

(d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian secara lanjut bagi peneliti selanjutnya mengenai hal yang sama secara lebih mendalam.

